



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN**

**UNIT KERJA** :  
LINGKUNGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MAHFUDZ
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 137635

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.375.000.000

1. Tanah Seluas 3.057 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN  
Rp. 575.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/140 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 221.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2009,  
HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA CB150R SEPEDA MOTOR KOPLING Tahun  
2017, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
3. MOBIL, HONDA CR-V MOBIL MATIC Tahun 2014, LAINNYA Rp.  
200.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 100.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 74.882.677

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.771.382.677

**III. HUTANG** Rp. 140.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.631.382.677

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.